



**TRANSFORMASI “*CIVIC EDUCATION*” DALAM
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI MENUJU KEHIDUPAN
PENDIDIKAN TINGGI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADABAN**

oleh :

SYAIFUL ANWAR

**Pidato Dies Natalis disampaikan pada Rapat Senat Terbuka
Universitas Muhammadiyah Semarang
Dalam rangka memperingati
Dies Natalis ke-4 Universitas Muhammadiyah Semarang
3 September 2003**

**TRANSFORMASI "CIVIC EDUCATION"
DALAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI MENUJU KEHIDUPAN
PENDIDIKAN TINGGI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADABAN**

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuhu

Yth. Bapak Gubernur Jateng atau yang mewakili ;
Yth. Ketua Kopertis Jateng atau yang mewakili ;
Yth. Bapak Ketua Majelis Tinggi PP Muhammadiyah ;
Yth. Bapak Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah ;
Yth. Para Anggota Dewan Penyantun Universitas Muhammadiyah Semarang ;
Yth. Para Anggota Senat Universitas Muhammadiyah Semarang ;
Yth. Rektor dan Para Pembantu Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang ;
Yth. Dekan dan Para Pembantu Dekan/Sekretaris Dekan di Lingkungan
Universitas Muhammadiyah Semarang ;
Yth. Ketua Senat Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Semarang ;
Yth. Segenap Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Semarang ;
serta hadirin sekalian

Sebelum saya memulai Pidato Dies Natalis ini, izinkan saya mengutipkan
sepenggal puisi dari Kyai Mustofa Bisri :

Lelaki boleh genit bermanja-manja
Wanita boleh sengit bermain bola
Anak muda boleh berkhotbah dimana-mana
Orang tua boleh berpacaran di mana saja

Ohoi,
Politikus boleh berlagak kyai
Kyai boleh bermain semau hati
Ilmuwan boleh menggugat ayat
Gelandangan boleh mewakili rakyat

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	07/KI/FP/C...
Tgl.	30-12-2008

Sebagai insan hamba-NYA, tak henti-hentinya marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkah dan rahmat-NYA; maka pada pagi hari ini kita dapat secara hikmat bersama-sama memperingati Dies Natalis Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS), yang diselenggarakan secara khusus dalam rangka Wisuda ke-2. Semoga pada usia yang amat sangat muda ini, UNIMUS makin mantap melalui pembenahan diri secara internal dan eksternal, sehingga dapat berjaya baik dalam skala regional, nasional bahkan international, seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam era global menyongsong milenium ketiga. Amin .

**TRANSFORMASI “CIVIC EDUCATION”
DALAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI MENUJU KEHIDUPAN
PENDIDIKAN TINGGI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADABAN**

A. PENDAHULUAN

Secara makro visi pendidikan nasional adalah mewujudkan masyarakat madani sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia baru dengan tatanan kehidupan yang sesuai dengan amanat proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses pendidikan. Visi ini dapat dijabarkan melalui misi pendidikan nasional yaitu menuju masyarakat madani melalui penyelenggaraan pendidikan yang otonom, luas namun adaptif dan fleksibel, bersifat terbuka dan berorientasi pada keperluan dan kepentingan bangsa. Dengan visi dan misi tersebut, maka tujuan pendidikan nasional kita adalah membentuk masyarakat dan organisasi pendidikan yang bersifat otonom sehingga mampu melakukan inovasi dalam pendidikan untuk menuju suatu lembaga yang beretika (beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beradab serta berwawasan budaya bangsa Indonesia), selalu menggunakan nalar (maju, cakap, cerdas, kreatif, inovatif dan bertanggung jawab), berkemampuan berkomunikasi sosial yang positif (tertib dan sadar hukum, kooperatif dan kompetitif, serta demokratis) dan memiliki sumberdaya manusia yang sehat dan tangguh sehingga menjadi manusia mandiri (Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Cita-cita tentang masyarakat madani meniscayakan adanya upaya yang serius dan sistematis untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Masyarakat madani bukan hanya sekedar sistem, tetapi juga proses. Oleh karena itu, diperlukan proses yang sistematis dalam mewujudkan masyarakat madani tersebut. Salah satu proses yang paling strategis dapat dilakukan melalui PENDIDIKAN, termasuk diantaranya Pendidikan Tinggi yang dalam aktivitasnya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan-pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).

Masyarakat madani merupakan konsep yang kompleks karena di dalamnya terkandung konsep relasi-relasi sosial beradab yang hendak ditransformasikan dalam kehidupan sehari-hari (Hamiwanto dan Said, 2000). Konsep masyarakat madani meliputi konsep tentang masyarakat, hukum, demokrasi, pemerintahan

dan kenegaraan, keterbukaan, perubahan sosial, kebudayaan dan lain-lain dalam relasi-relasi dan struktur sosial (QS. Ali Imran 110-112; Hadikusuma, 1995; Basyir, 1983, 1995; Culla, 1999; Rahardjo, 1999) Kompleksitas konsep masyarakat madani ini perlu ditransformasikan dalam kehidupan masyarakat melalui pendidikan yang sistematis. Salah satu cara paling strategis mentransformasikan konsep masyarakat madani agar aplikatif dalam dinamika kehidupan ialah melalui "*CIVIC EDUCATION*"; yang di dalamnya mengandung upaya sosialisasi, diseminasi, dan aktualisasi konsep, sistem, nilai, dan budaya demokrasi melalui pendidikan. Penyebaran nilai-nilai "*Civic Education*" melalui pendidikan menjadi semakin *urgent* manakala bangsa ini mengalami krisis multi-dimensional yang berkepanjangan di tengah transisi sosial-politik menuju demokrasi. Titik urgensi ini terletak pada harapan terhadap generasi mendatang yang akan tumbuh dan berkembang melalui dunia pendidikan.

B. FENOMENA PATOLOGI SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA SAAT INI

Minimal terdapat delapan fenomena patologi sosial yang timbul dari proses transisi menuju demokratisasi di negeri ini, yaitu (Majelis Tinggi PP Muhammadiyah, 2003):

1. Hancurnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat

Melemahnya kontrol negara sebagai penegak hukum dan keadilan masyarakat akhirnya semakin mengikis kepercayaan masyarakat pada upaya penegakan hukum di negeri ini. Beberapa kelompok sosial yang lemah di negeri ini hampir merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan kelompok sosial lain yang lebih kuat. Hilangnya keberpihakan negara pada nilai-nilai keadilan dan pudarnya ketaatan pada hukum menjadi salah satu persoalan serius yang mengancam keberlangsungan demokrasi di negeri ini

2. Memudarnya kehidupan kewargaan dan nilai-nilai komunitas

Pelanggaran atas hak-hak individual, penjarahan atas hak orang lain, dan penjarahan tanah adat secara sistematis oleh pihak pengusaha atau pemerintah merupakan kasus yang semakin banyak dijumpai di negeri ini. Di samping itu, ada juga problem mental yang sangat serius mengancam kepentingan bersama masyarakat, yaitu kesadaran tanggung

jawab yang sangat rendah atas pemeliharaan fasilitas-fasilitas umum melalui anarkhisme demonstrasi dan aksi massa.

3. Kemerosotan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat

Uniformasi (penyeragaman) yang selama ini cenderung dilakukan rezim otoriter juga membawa akibat buruk pada harmonitas masyarakat yang plural, sehingga nilai-nilai lokal tradisional termarginalisasi secara sistematis (sementara pada saat yang sama belum ditemukan nilai-nilai baru yang dapat mentransformasikan masyarakat yang bersatu dalam keberagaman). Pada saat kontrol negara mulai melemah, maka keberagaman sosial yang dahulu dimarginalisasikan akhirnya semakin menguat secara *chauvinistic*, sehingga mengancam harmoni dalam pluralitas masyarakat negeri ini. Intoleransi juga semakin menggejala dalam konteks interaksi antar agama, antar daerah, antar etnis, antar partai politik, dan lain-lain. Berbagai kasus pertikaian etnis (seperti Madura-Dayak di Kalimantan), pertikaian agama (seperti Islam-Kristen di Maluku), pertikaian pendukung partai politik (seperti PDIP-PKB), dan berbagai macam pertikaian di negeri ini merupakan cermin bagi kemerosotan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat.

4. Memudarnya nilai-nilai kejujuran, kesopanan dan rasa tolong menolong

Nilai-nilai kejujuran, kesopanan, sikap tenggang rasa, saling menolong dan ketundukan pada hukum seakan semakin menipis. Ikatan-ikatan sosial lama yang mengedepankan sikap kasih sayang terhadap sesama seakan berganti wajah dan mengalami proses dehumanisasi. Anggota masyarakat seakan menjadi individu-individu yang kaku dan sosial-*disembedded*. Maraknya tindakan asusila juga semakin dirasakan dalam transisi masyarakat saat ini.

5. Melemahnya nilai-nilai dalam keluarga

Melemahnya nilai-nilai dalam keluarga merupakan akibat saling pengaruh antara faktor eksternal dan faktor internal keluarga, dan hal ini ditandai dengan melemahnya nilai tanggungjawab dalam keluarga, tidak terpenuhinya kebutuhan akan dukungan dan perlindungan terhadap anggota keluarga, serta lunturnya moral dan kebersamaan dalam keluarga. Di samping itu, akibat krisis ekonomi upaya pendidikan melalui keluarga juga semakin memprihatinkan. Orang tua (baik ayah dan ibu) harus

bekerja lebih keras lagi dan menghabiskan waktu untuk pekerjaan dan mencari uang guna mencukupi kebutuhan keluarga.

6. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat korupsi paling buruk di muka bumi. Mewabahnya berbagai bentuk *abuse of power* tersebut juga ditandai dengan tidak diperolehnya pelayanan yang adil dari penyelenggara negara. Transparansi dalam pemakaian keuangan negara seringkali tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Kesadaran kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) juga belum terlalu tinggi, bahkan seringkali menghadapi represi dari rezim yang sedang berkuasa. Sementara itu, akses masyarakat terhadap informasi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan juga banyak terhambat, sehingga pada akhirnya memberikan peluang semakin besar timbulnya praktek KKN.

7. Kerusakan sistem dan kehidupan ekonomi

Kerusakan sistem ekonomi ditandai dengan merebaknya monopoli yang bersembunyi dengan istilah tata niaga, hilangnya kompetisi yang sehat dalam dunia usaha, dan ketertutupan dari tuntutan pasar bebas. Kebijakan makro dan mikro ekonomi bangsa ini yang tidak mengacu pada persaingan yang sehat dan fair, keadilan serta pemerataan kesejahteraan bagi rakyat telah menimbulkan polarisasi sosial dan ketimpangan ekonomi yang besar. Membesarnya tingkat pengangguran terdidik dan kurang terdidik serta pemusatan kawasan pembangunan merupakan persoalan ekonomi bangsa ini yang belum selesai. Di samping persoalan struktural tersebut, persoalan kultural dan mental di kalangan masyarakat juga cukup besar menghambat kemajuan kehidupan ekonomi. Indek kewirausahaan di kalangan masyarakat yang rendah juga merupakan kendala pembangunan ekonomi, terutama bagi kalangan pribumi.

8. Pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan

Fenomena gerakan separatisme akhir-akhir ini cukup menggejala, seperti di Aceh, Maluku dan Papua. Banyak faktor yang menyebabkan

disintegrasi bangsa ini, baik faktor ekonomi, politik, keamanan, maupun budaya. Keberagaman dalam satu bangsa (*Bhinneka Tunggal Ika* atau *Unity in Diversity*) mulai terkikis. Solidaritas kebangsaan seakan tersumbat oleh berbagai keterbatasan dan kentalnya kepentingan untuk memisahkan diri. Oleh karena itu, perlu ada upaya reorientasi *nation building* untuk merekatkan kembali ikatan-ikatan kebangsaan yang beragam menjadi satu bangsa.

Sekian banyak penyakit sosial di seluruh lini kehidupan masyarakat tersebut di atas harus segera dieliminasi secara sistematis dalam era reformasi sekarang ini. Beberapa komponen masyarakat yang menganggap reformasi sebagai peluang emas, meyakini reformasi sebagai sebuah pintu terbuka bagi SOSIALISASI dan INTERNALISASI nilai-nilai luhur menuju apa yang disebut dengan warga negara yang baik (*good citizen*). Reformasi menuju *good citizen* bagi Indonesia bukanlah hal mudah, karena luasnya wilayah, beragamnya suku bangsa, tingkat pendidikan yang beraneka, kesejahteraan ekonomi yang senjang, serta jumlah penduduk yang sangat besar. Secara teoritis dan praktis, lembaga pendidikan memegang peranan penting dalam usaha merubah masyarakat menuju *good citizen*. Karena memiliki tatanan/perangkat yang sistematis, yaitu: kurikulum yang terencana, tahapan proses yang jelas, serta peserta didik dan pendidik yang terlatih. Istilah pembentukan *good citizen* melalui pendidikan inilah yang kemudian dikenal sebagai *CIVIC EDUCATION*.

C. PARADIGMA BARU PENDIDIKAN TINGGI DAN MUHAMMADIYAH

Kata kunci suatu organisasi adalah **kualitas**, artinya hasil dan dampak organisasi tersebut dituntut selalu untuk memenuhi seperangkat **standar** tertentu darimana dapat disimpulkan kualitasnya oleh masyarakat pengguna. Dari penelaahan dan pengalaman lapangan tentang organisasi kerja dapat disimpulkan bahwa kreativitas, ingenuitas, dan produktivitas suatu organisasi profesional lebih dimotivasi oleh pola kerja yang luwes dan mandiri dari pada pola kerja yang terstruktur secara kaku. Hal ini dapat dijadikan salah satu alasan kuat agar perguruan tinggi **dikelola berdasarkan asas otonomi**. Namun perguruan tinggi tidak diselenggarakan dalam 'suatu ruang hampa', tetapi selalu berkaitan dan bergantung pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya; sehingga tata nilai, norma, perundangan dan peraturan yang menjadi rambu-rambu dalam memandu

perkembangan masyarakat, selalu harus diperhatikan dan dijadikan acuan dalam pengelolaan perguruan tinggi. Sehingga asas otonomi yang diberlakukan dalam pengelolaan suatu perguruan tinggi, selalu harus **disertai dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas**.

Perguruan tinggi mengemban fungsi tertentu di masyarakat, yang tercermin dari utilitas atau kegunaannya bagi masyarakat. Fungsi yang dianggap melekat pada perguruan tinggi adalah **pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi)**. Apabila Tri Dharma Perguruan Tinggi itu dilaksanakan dengan baik maka akan menghasilkan lulusan (manusia terdidik), ilmu pengetahuan baru (hasil penelitian) dan jasa pembangunan masyarakat (hasil pengabdian kepada masyarakat). Masyarakat sebagai penyandang aliran sumberdaya yang memungkinkan terselenggaranya perguruan tinggi, berhak memperoleh informasi dan menuntut kualitas kinerja perguruan tinggi. Untuk keperluan itu dibutuhkan suatu **badan yang secara mandiri dapat menilik dan mem-'verifikasi' kinerja setiap perguruan tinggi yang diselenggarakan di masyarakat**. Hampir semua negara memiliki badan seperti itu, termasuk Indonesia. Pemerintah telah membentuk **Badan Akreditasi Nasional** untuk melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan pengelolaan perguruan tinggi. Pengambilan keputusan manajerial di perguruan tinggi harus ditunjang dan dilandasi oleh fakta, data dan informasi yang dikumpulkan, diolah dan disimpulkan melalui **proses evaluasi** tersebut.

Kelima hal yang telah disebutkan di atas, yaitu : **kualitas, otonomi, akuntabilitas/ pertanggungjawaban, akreditasi dan evaluasi** digunakan sebagai lima komponen acuan dasar atau Paradigma Penataan Sistem Pendidikan Tinggi sebagai berikut :

1. Hasil dan kinerja perguruan tinggi harus selalu mengacu pada **kualitas yang berkelanjutan**.
2. **Kualitas berkelanjutan**, yang dilandasi kreativitas, ingenuitas dan produktivitas pribadi sivitas akademika dapat dirangsang oleh pola manajemen yang berasaskan **otonomi**.
3. **Otonomi** perguruan tinggi harus senafas dengan **akuntabilitas/ pertanggungjawaban** mengenai penyelenggaraan, kinerja dan hasil perguruan tinggi.

4. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang handal dan syahih mengenai penyelenggaraan, kinerja dan hasil perguruan tinggi, diaktualisasi melalui proses **akreditasi** oleh **Badan Akreditasi Nasional**.
5. Tindakan manajerial utama yang melandasi pengambilan keputusan dan perencanaan di perguruan tinggi adalah proses **evaluasi**.

Dari kelima dasar Penataan Sistem Pendidikan Tinggi itu, selanjutnya dijabarkan dalam proses pelaksanaannya melalui konsep RAISE+LEAP (*Relelevance, Academic Atmosphere, Internal Management and Organization, Sustainability, Eficiency and Productivity, Leadership and Institutional Commitment, Equity-to obtain the opportunity to study, Access-an open ways to follow programs, and Partnership-with industry, community, local and national government and also international):*

1. *Relelevance* adalah kesesuaian antara output dari suatu institusi dengan kebutuhan masyarakat, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang, dengan cara menjawab kebutuhan sumberdaya manusia bagi dunia industri, pemerintahan, dan unsur lainnya dalam hal kepakaran, profesionalisme, ketrampilan dan pengetahuan;
2. *Academic Atmosphere* berkaitan erat dengan pelaksanaan proses pendidikan, yakni terciptanya suasana akademik yang kondusif dalam interaksi antara dosen-mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antar-sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, sehingga muncul kegairahan dalam proses pembelajaran di tingkat program studi. Dari isu strategis ini, diharapkan peranan program studi dan sivitasnya secara kelembagaan dapat meningkatkan motivasi, kreatifitas, kesungguhan dan keteraturan proses belajar mengajar (PBM), untuk mencapai kualitas proses-hasil pendidikan yang diharapkan;
3. *Internal Management and Organization*, berkaitan erat dengan beberapa prinsip dalam paradigma baru manajemen pendidikan tinggi, yaitu otonomi, akuntabilitas, akreditasi, evaluasi dan kualitas proses. Upaya penjabaran konsep ini perlu dituangkan secara jelas dalam program yang disesuaikan dengan sumberdaya yang dimiliki, misalnya: program monitoring dan evaluasi internal, upaya pembuatan akreditasi internal,

proses seleksi internal mengenai penetapan prioritas kegiatan yang diusulkan, dan lain sebagainya dengan melibatkan seluruh komponen sivitas akademika di dalam dan di luar program studinya.

4. *Sustainability*. Konsep ini merupakan kegiatan-kegiatan untuk menjaga kelangsungan aktivitas terselenggaranya PBM yang berkualitas, sehingga diperlukan upaya kreatif untuk menjaga keberlangsungan program, baik melalui pendidikan-pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat maupun kerjasama.
5. *Efficiency and Productivity*. Pengukuran isu strategis ini dilakukan terhadap tingkat pemanfaatan masukan (sumberdaya) yang digunakan untuk proses pembelajaran, melalui perubahan-perubahan yang dapat segera dimonitor misalnya aspek pelayanan yang cepat dan professional.
6. *Leadership and Institutional Commitment*. Konsep ini pada intinya diperlukan adanya dukungan institusional terhadap program melalui *resource empowerment*.
7. *Equity-to obtain the opportunity to study in higher education*
8. *Access-an open ways to follow programs in higher education*
9. *Partnership-with industry, community, local and national government and also international*

Paradigma penataan pendidikan tinggi di atas sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Muhammadiyah sebagai salah satu lembaga organisasi kemasyarakatan yang telah berusia cukup tua, dengan menjadikan PENDIDIKAN sebagai salah satu aktivitas penting bagi usahanya dalam rangka meningkatkan mutu masyarakat. Posisi penting pendidikan bagi Muhammadiyah tersebut tampak dari jenjang lembaga pendidikan yang dikelolanya (Depdiknas, 1998/1999; <http://www.pdk.go.id>; <http://www.dikti.org>), yaitu: 10.98% pada tingkat pendidikan dasar, 10.52% pendidikan menengah dan 10.48% pendidikan tinggi. Paparan ini menggambarkan bahwa keterlibatan Muhammadiyah dalam pengembangan dan realisasi *CIVIC EDUCATION*, akan memiliki akses yang cukup besar di tengah masyarakat Indonesia. Angka 10% di atas tentu dapat menjadi modal yang signifikan bagi kemampuan Muhammadiyah untuk mengambil inisiatif bagi pelibatan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), penyelenggara pendidikan, serta dapat

menjadi modal *bargaining position* terhadap pemerintah. Keluasan jaringan, jenjang pendidikan yang dikelola, serta integrasinya terhadap beberapa jenjang pendidikan akan memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan partisipasi pengembangan masyarakat menuju *good citizen*.

D. “CIVIC EDUCATION” DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Salah satu peluang dalam mengembangkan *Civic Education* di Indonesia dilaksanakan melalui lembaga perguruan tinggi . Perguruan tinggi di Indonesia memiliki akses yang kuat di tengah masyarakat, karena masyarakat percaya bahwa perguruan tinggi merupakan wadah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diaplikasikan melalui Tri Dharma Perguruan Tingginya, yaitu pendidikan-pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, perguruan tinggi juga memiliki akses yang kuat ikut mendorong elemen bangsa yang lain, seperti LSM, organisasi masyarakat, maupun pemerintah, untuk aktif mendukung gagasan *Civic Education*. Dengan demikian, *Civic Education* melalui perguruan tinggi (Muhammadiyah) dapat dikatakan memiliki makna yang signifikan untuk melakukan pendidikan masyarakat menuju demokratisasi dan perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

Civic Education sesungguhnya bukan merupakan agenda yang benar-benar baru di muka bumi ini. Dari hasil-hasil penelitian tentang *Civic Education* di berbagai negara sesungguhnya disimpulkan bahwa secara umum *Civic Education* diarahkan untuk mendalami kembali nilai-nilai paling fundamental yang dianut bangsa yang bersangkutan. Berikut ini beberapa contoh penerapan materi *Civic Education*. Di **Australia**, materi *Civic Education* yang diajarkan ialah: (a) prinsip, proses, dan nilai demokrasi, (b) proses pemerintahan Australia, (c) keahlian dan nilai partisipasi aktif di masyarakat. Di **Amerika**, materi yang diajarkan meliputi: (a) penekanan warganya untuk produktif dan sadar haknya sebagai warga Amerika dan warga Dunia, (b) nilai-nilai dan prinsip demokrasi konstitusional, (c) mampu mengambil keputusan selaku warga masyarakat demokratis dan multicultural di tengah dunia yang saling tergantung. Sedangkan di **Jepang**, *Civic Education* menekankan pada dua aspek, yaitu : (a) struktur masyarakat,

pemerintahan nasional dan ekonomi; dan (b) sejarah nasional dan masyarakat yang demokratis. Di Hongkong, materi yang ditekankan ialah nilai-nilai Cina, keluarga, harmoni sosial, tanggung jawab moral, dan mesin politik RRC. Di Taiwan, pembelajaran *Civic Education* ditekankan kepada: (a) pengetahuan kewarganegaraan berdasarkan aspek psikologi, ilmu politik, ekonomi, sosiologi, hukum dan budaya; (b) perilaku moral (menyangkut kohesi sosial, identitas nasional, dan demokrasi) dan (c) menghargai budaya lain. Secara umum, negara-negara Asia menekankan pada aspek moral (karakter individu), kepentingan komunal, identitas nasional dan perspektif internasional. Sementara Amerika dan Australia menekankan pentingnya hak dan tanggung jawab individu, serta sistem dan proses demokrasi, hak asasi manusia dan ekonomi pasar.

Civic Education dalam pendidikan tinggi di Indonesia, sesungguhnya sudah tercermin dalam Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, yaitu bahwa pendidikan diselenggarakan: (a) secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; (b) sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna; (c) sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; (d) dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik dalam proses pembelajaran; (e) dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan (f) dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

E. TRANSFORMASI “*CIVIC EDUCATION*” DALAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Langkah-langkah transformasi *Civic Education* dalam semua lini fungsi Perguruan Tinggi (Tri Dharma Perguruan Tinggi) dapat dilakukan antara lain melalui program-program seperti (UGM, 2002; dan Majelis Tinggi PP Muhammadiyah, 2003):

1. Pengembangan *success skill*, yang ditujukan untuk mengembangkan 3 pilar ketrampilan utama mahasiswa dalam proses pengembangan diri, yaitu *learning skill*, *thinking skill* dan *living skill*. Program ini sangat

relevan dalam mempersiapkan kompetensi kepemimpinan pada calon lulusan, staf dosen dan tenaga administrasi/teknisi (*University student and staf development*) dengan bekal *living, thinking* dan *learning skill*.

2. Pengembangan manajemen mutu pembelajaran, ditujukan untuk lebih mengaktifkan organisasi manajemen mutu di lingkungan universitas sampai level program studi, agar proses pembelajaran konsisten terjamin dan menyediakan instrumen untuk perbaikan mutu berkelanjutan serta diarahkan untuk menjadi *learning organization*. Program ini antara lain lebih mengarah kepada: (a) verifikasi koherensi antara kompetensi program studi dan kurikulum. Hal ini penting karena kompetensi akan terkait dengan peran lulusan di masyarakat. Dengan adanya program verifikasi ini, maka relevansi dan efisiensi kurikulum akan meningkat; (b) audit kegiatan dosen dan pemberian peran mahasiswa dalam mengevaluasi proses pembelajaran akan mendorong dosen untuk menyediakan waktu di luar kuliah untuk berinteraksi dengan mahasiswa sehingga atmosfir akademis akan meningkat; (c) organisasi manajemen mutu pada setiap level yang terbentuk didorong untuk bersifat mandiri, *self auditing, monitoring* dan *improvement*; yang selanjutnya budaya mutu diharapkan dapat melekat pada setiap unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran karena aktivitas ini menyeluruh untuk semua program studi.
3. *Innovation grants*, merupakan kegiatan yang ditujukan untuk merangsang semangat kompetisi dan sekaligus untuk mendapatkan serta mengaplikasikan gagasan baru dalam proses pembelajaran, administrasi pendidikan, organisasi kemahasiswaan, serta sinergi antar unsur yang ada di dalam dan di luar Universitas. Jika inovasi ini diadopsi oleh staf dan kelompok lain yang tidak mendapatkan grants dan secara terus menerus diestafetkan pada staf atau kelompok lainnya maka keberlanjutan pemanfaatannya tinggi. Dan proses inovasi ini akan menumbuhkan kepemimpinan tim yang berorientasi *problem solver*.
4. Pemberdayaan mahasiswa berprestasi, yang dilakukan dengan prinsip *equity in education* menuntut mahasiswa yang mempunyai kemampuan luar biasa harus diperlakukan berbeda dengan mahasiswa berkemampuan rata-rata, dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan benih

kepemimpinan di kalangan mahasiswa, sehingga terjadi sinergi dengan salah satu tujuan organisasi mutu universitas.

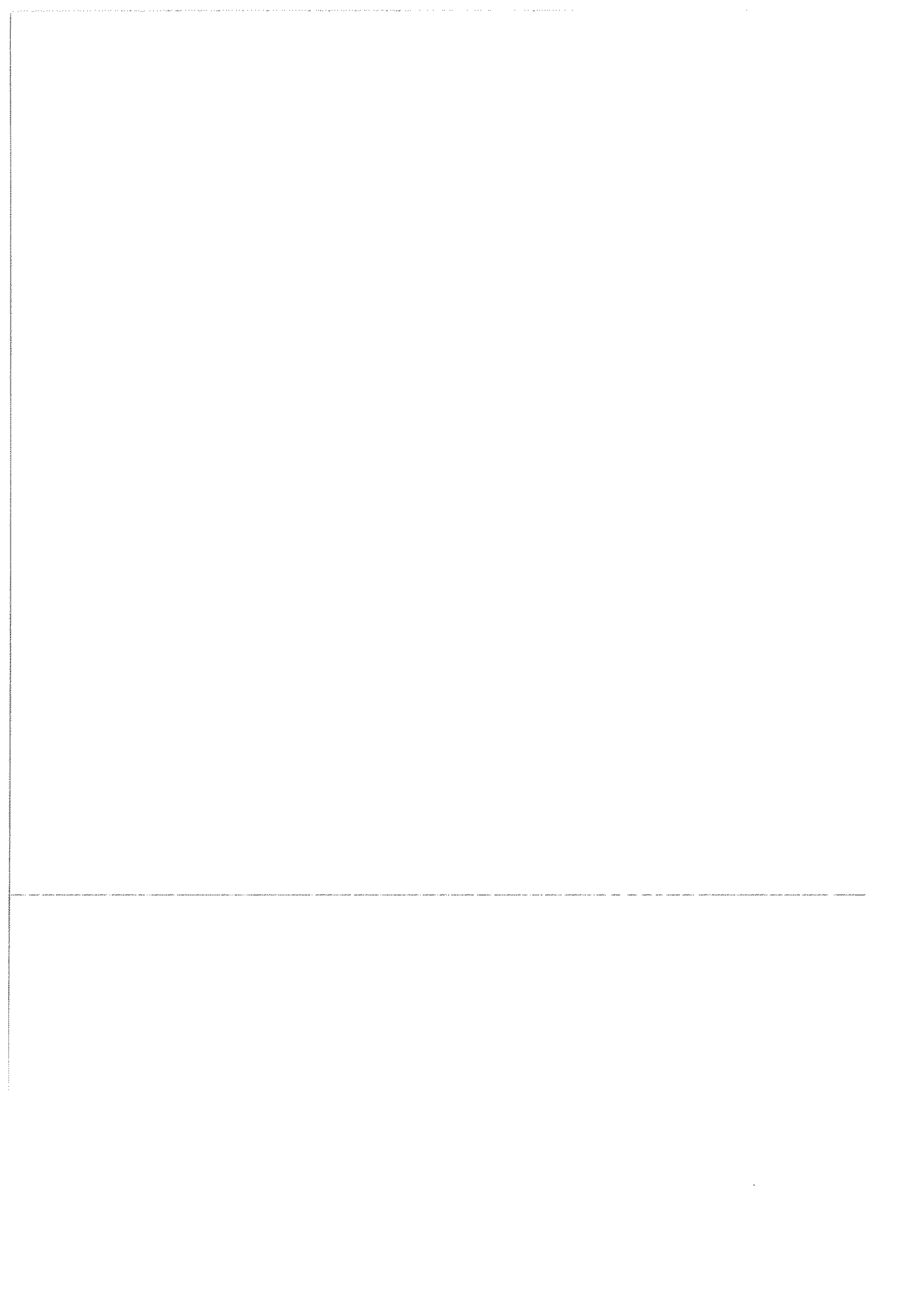
Langkah-langkah transformasi *Civic Education* ini harus bersifat inovatif, terutama dalam aspek-aspek: (a) transfer nilai-nilai kepemimpinan dengan visi “*to bring local culture to enhance global vision*”, (b) pengembangan *critical mass* yang mengarah kepada “*culture and system development*”, (c) berisifat menyiapkan landasan yang kokoh bagi perguruan tinggi untuk melaksanakan peran sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta landasan bagi keunggulan kerjasama dan kompetensi global; dan (d) memposisikan mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan, sebagai sumber spirit dan sumberdaya bagi percepatan peningkatan mutu pendidikan tinggi.

F. PENUTUP

Mengakhiri pidato ini, mari kita mencoba melakukan transformasi *Civic Education* dalam tri dharma perguruan tinggi menuju kehidupan pendidikan tinggi yang demokratis dan berkeadaban. Dengan sosialisasi *Civic Education* ini diharapkan terjadinya habituaisasi (pembiasaan), internalisasi (penyerapan nilai secara mendalam), dan institusionalisasi (pelembagaan) dalam alam pikiran dan sikap yang membentuk tindakan-tindakan sosial (*social actions*) dari segenap anggota sivitas akamika dan masyarakat selaku warga negara dalam suasana kehidupan yang menjunjung tinggi otonomi, demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, keadilan, pluralitas, dan berkeadaban.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-qur'anul. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Pt. Karya Toha Putra, Semarang.
- Basyir, A.A. 1983. Citra Masyarakat Muslim. Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Basyir, A.A. 1995. Cita-Cita Sosial Islam: Sebuah Tinjauan Doktrin dan Sejarah (dalam M. Yunan Yusuf dkk.). Masyarakat Utama: Konsepsi dan Strategi. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan PP Muhammdiyah, Jakarta.
- Culla, A.S. 1999. Masyarakat Madani : Pemikiran, Teori dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi. Rajawali, Jakarta.
- Hadikusuma, D. 1995. Masyarakat Utama. (dalam M. Yunan Yusuf dkk.). Masyarakat Utama: Konsepsi dan Strategi. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan PP Muhammdiyah, Jakarta.
- Hamiwanto, S. dan M.A. Said. 2000. Masyarakat Madani: Mimpi Lama, Judul Baru ?. Makalah Tidak Diterbitkan.
- Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammdiyah. Pendidikan Kewarganegaraan. Pelatihan *Stackholder* Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Yogyakarta.
- Rahardjo, M.D. 1999. Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial. LSAF, Jakarta.
- Republika. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Edisi Kamis, 30 Juli 2003.
- Universitas Gadjah Mada. 2003. Total Quality Culture and System. Peningkatan Pertumbuhan Kepemimpinan Berkualitas. Yogyakarta.



SELAMAT DATANG



**Dies Natalis (Milad) Ke-4 dan Wisuda Ke-2
Universitas Muhammadiyah Semarang
(UNIMUS) Tahun 2003**

**TRANSFORMASI "*CIVIC EDUCATION*" DALAM
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI MENUJU
KEHIDUPAN PENDIDIKAN TINGGI YANG
DEMOKRATIS DAN BERKEADABAN**

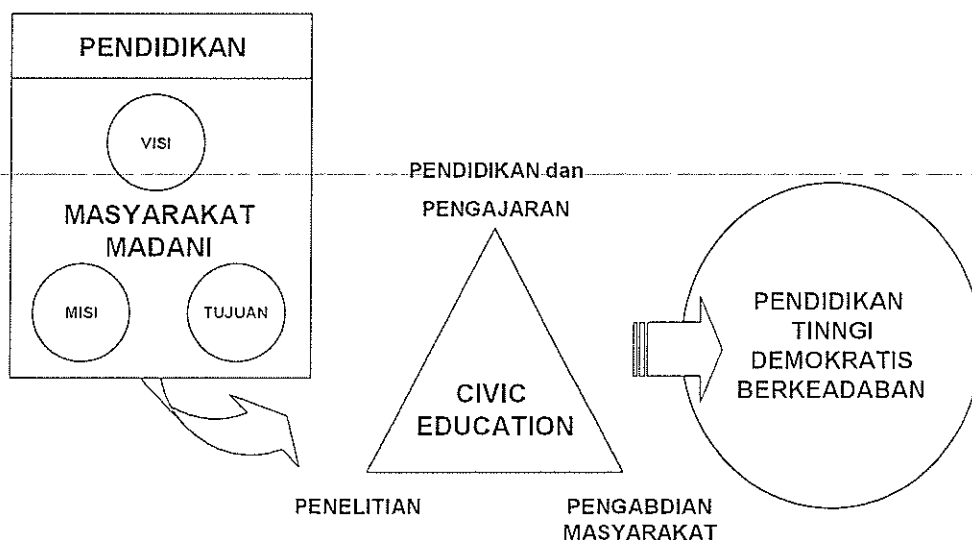
**Oleh :
Syaiful Anwar**

Puisi Karangan Kyai Mustofa Bisri :

- Lelaki boleh genit bermanja-manja
- Wanita boleh sengit bermain bola
- Anak muda boleh berkhotbah di mana-mana
- Orang tua boleh berpacaran di mana saja

- Ohoi,
- Politikus boleh berlagak kyai
- Kyai boleh bermain semau hati
- Ilmuwan boleh menggugat ayat
- Gelandangan boleh mewakili rakyat

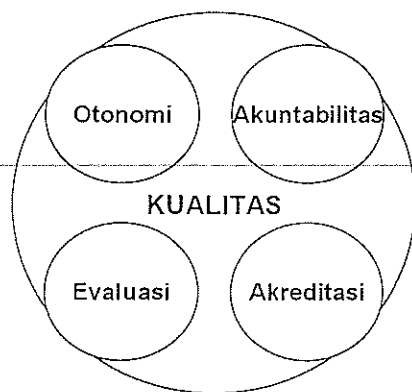
A. PENDAHULUAN



B. FENOMENA PATOLOGI SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA SAAT INI

- Hancurnya nilai-nilai demokrasi
- Memudarnya kehidupan kewargaan dan nilai-nilai komunitas
- Kemerostan nilai-nilai toleransi
- Memudarnya nilai-nilai kejujuran, kesopanan dan rasa tolong menolong
- Melemahnya nilai-nilai dalam keluarga
- Praktek KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Kerusakan sistem dan kehidupan ekonomi
- Pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan

C. PARADIGMA BARU PENDIDIKAN TINGGI DAN MUHAMMADIYAH



RAISE+LEAP

- Relevance (R)
- Academic Atmosphere (A)
- Internal Management and (I) Organization
- Sustainability (S)
- Efficiency and Productivity (E)
- Leadership and Institutional Commitment (L)
- Equity (E)
- Access (A)
- Partnership (P)

Muhammadiyah : 1. Pendidikan Dasar = 10.98 %
2. Pendidikan Menengah = 10.52 %
3. Pendidikan Tinggi = 10.48 %



D. CIVIC EDUCATION DALAM PENDIDIKAN TINGGI

ASIA :

Aspek Moral, Kepentingan Komunal, Identitas Nasional dan Perspektif Internasional

AMERIKA dan AUSTRALIA :

Hak dan Tanggung Jawab Individu, Sistem dan Proses Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Ekonomi Pasar

INDONESIA :

- Pendidikan demokratis, berkeadilan, HAM, keagamaan, kultural dan majemuk
- Pendidikan terbuka dan multi tingkat
- Pendidikan sepanjang masa (hayat)
- Pendidikan keteladanan
- Pendidikan untuk membangkitkan budaya membaca, menulis dan berhitung
- Pendidikan dengan keterlibatan semua komponen masyarakat

E. TRANSFORMASI CIVIC EDUCATION DALAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

- ***Pengembangan Succes Skill (Learning, Thingking and Living)***
- ***Pengembangan Manajemen Mutu Pembelajaran***
 - a. ***Verifikasi Koherensi Kompetensi Program Studi – Kurikulum***
 - b. ***Audit Kegiatan Dosen dan Peran Evaluasi oleh Mahasiswa***
 - c. ***Penerapan Manajemen Mutu di Semua Level***
- ***Innovation Grants***
- ***Pemberdayaan Mahasiswa Berprestasi***
- ***Pendidikan Entrepreneurship***
- ***Pengembangan Partnership***

F. PENUTUP

Integrasi dan Sosialisasi Civic Education dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi diharapkan terjadinya :

Habitualisasi, Internalisasi dan Institusionalisasi dalam Alam Pikiran dan Sikap yang Membentuk Social Actions dari Segenap Sivitas Akademika dan Masyarakat dalam Suasana Kehidupan yang Menjunjung Tinggi Otonomi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Toleransi, Berkeadilan, Pluralitas dan Berkeadaban



**TERIMA
KASIH**